

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini membahas strategi mitigasi bencana yang diterapkan oleh BPBD Kota Sawahlunto, yang meliputi penyusunan berbagai dokumen strategis, seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontinjensi (Rekon), dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai landasan dalam merancang program mitigasi yang terukur dan berorientasi pada hasil, serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana. Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mendukung mitigasi, seperti peraturan pembangunan di kawasan rawan bencana, implementasinya terkendala oleh berbagai masalah, seperti minimnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program mitigasi tidak merata, dengan daerah-daerah terpencil, seperti desa-desa yang rawan longsor, yang seringkali tertinggal. Di samping itu, meskipun BPBD telah berupaya menjalin kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan lembaga nonpemerintah, koordinasi ini masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penyediaan dana, penguatan kapasitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi. Program-program mitigasi yang telah dilaksanakan, seperti Destana dan SPAB, meskipun memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam strategi mitigasi bencana di daerah ini, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai sistem mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan mitigasi bencana, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana seperti Kota Sawahlunto. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik dan efektif, seperti penguatan penegakan regulasi dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan wawasan baru dalam praktik mitigasi bencana, terutama terkait dengan pentingnya keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar instansi, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam memitigasi risiko bencana. Di sisi lain, temuan ini juga memberikan kontribusi pada literatur mitigasi bencana, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Meski penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang strategi mitigasi bencana di Kota Sawahlunto, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan kebijakan dan regulasi tanpa mempertimbangkan sepenuhnya dampak sosial-ekonomi dari program mitigasi. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi aspek sosial dan ekonomi dari mitigasi bencana di daerah ini. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi teknologi mitigasi, seperti sistem peringatan dini (EWS), dan evaluasi terhadap program Destana di desa-desa lain dapat memberikan wawasan lebih lanjut dalam memperkuat strategi mitigasi di masa depan.

## **6.2 Saran**

Dalam rangka meningkatkan strategi mitigasi bencana di Kota Sawahlunto, beberapa langkah strategis perlu diterapkan oleh berbagai pihak terkait. BPBD Kota Sawahlunto diharapkan dapat memperluas cakupan program Destana ke seluruh desa guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan

media sosial perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mitigasi bencana. Pengadaan sistem peringatan dini (EWS) juga menjadi langkah preventif yang harus diupayakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah rawan. BPBD juga perlu aktif berkolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk KOGAMI dan Jemari Sakato Provinsi Sumatera Barat, guna memperkuat strategi mitigasi bencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi yang lebih terstruktur antara BPBD dan OPD lain agar kebijakan mitigasi dapat diintegrasikan secara lintas sektoral. Selain itu, percepatan pencairan dana tanggap darurat harus didorong agar program mitigasi dapat terlaksana secara lebih efektif. Dinas PUPR juga memiliki tanggung jawab dalam menegakkan regulasi pembangunan di kawasan rawan longsor dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Selain itu, kerja sama dengan BPBD perlu diperkuat dalam pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana, seperti perbaikan jalan dan jembatan di wilayah terdampak.

Dinas Perkim harus mempercepat proses rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana dengan memperhatikan standar keamanan dan kelayakan. Selain itu, program pelatihan teknis kepada masyarakat perlu dikembangkan guna meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko pembangunan di kawasan rawan. Sementara itu, Dinas Sosial dapat mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana agar memiliki dampak jangka panjang dalam membangun ketahanan masyarakat.

Dari sisi perencanaan keuangan, BPKAD perlu menyusun anggaran yang lebih fleksibel untuk mendukung pengadaan teknologi mitigasi seperti EWS. Pengelolaan dana BTT juga harus dioptimalkan agar dapat digunakan secara lebih efektif dalam situasi darurat. Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar desa untuk memastikan

implementasi program mitigasi berjalan lebih merata. Selain itu, sosialisasi reguler di tingkat kecamatan perlu diadakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

Di tingkat lokal, kelurahan dan desa harus memanfaatkan dana desa secara maksimal untuk mendukung kegiatan mitigasi, seperti penanaman pohon di kawasan rawan dan kegiatan gotong royong. Pembentukan kelompok relawan yang lebih aktif juga diperlukan untuk membantu implementasi program mitigasi di tingkat lokal. Destana berperan dalam memperkuat pelatihan bagi anggotanya agar kapasitas mereka dalam menghadapi bencana semakin meningkat. Simulasi bencana juga harus rutin dilakukan agar kesiapsiagaan masyarakat tetap terjaga.

Tagana sebagai salah satu elemen penting dalam penanganan bencana harus meningkatkan jumlah pelatihan bagi anggotanya agar mereka lebih siap dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, kerja sama dengan OPD lain perlu dikembangkan guna memperluas cakupan kegiatan mitigasi. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, strategi mitigasi bencana di Kota Sawahlunto dapat semakin ditingkatkan sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

